

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA
MODAL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
(STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAMBI)**

Delta Forza¹⁾, Zamzami²⁾, Enggar Diah Puspa Arum³⁾

¹⁾*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2018*

^{2,3)}*Dosen Pembimbing*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of Pendapatan Asli Daerah (PAD) and General Allocation Funds to Capital Expenditures, and to test and prove empirically about the influence of Pendapatan Asli Daerah (PAD) and General Allocation Fund (DAU) for both simultaneous and partial, and their impact on regional economic growth. The results showed that the original revenue and general allocation fund affect the capital expenditure in the regency / municipality of Jambi Province. Thus this research proved that PAD and DAU simultaneously have an effect on to Capital Expenditure (BM). Second, the original revenue of the region and the General Allocation Fund affect the capital expenditure in the district / city of Jambi Province. Thus it can be stated that PAD, DAU, and BM have simultaneous and partial effects on economic growth.

Keywords: *Local Revenue, Capital Expenditure, General Allocation Fund, and Economic Growth.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah, untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, dan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal secara simultan maupun parsial, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Dengan demikian peneliti ini berhasil membuktikan bahwa PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Kedua, Pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/ kota Provinsi Jambi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa PAD, DAU, dan BM berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era demokratisasi menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas semakin diperlukan. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Era demokrasi ini pulalah yang menjadi pendorong para berbagai pihak baik itu pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, maupun masyarakat awam mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Era demokrasi dalam konteks keuangan, mengalami perkembangan yang pesat terutama sejak diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada tanggal 1 Januari 2001. Undang-Undang ini telah memberikan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Provinsi Jambi merasakan dampak dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah khususnya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berlandaskan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong peningkatan alokasi belanja modal daerah. Sumber-sumber pendanaan lain adalah dana perimbangan. Salah satu dana perimbangan yang menjadi penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah.

Sumber-sumber daya yang telah dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu sumber pendanaan bagi belanja daerah, belanja daerah disini lebih diarahkan pada Belanja Modal, karena Belanja Modal menjadi pendukung dari peningkatan sarana dan prasarana bagi pelayanan publik (Sholikhan Imoratus dan Agus Wahyusin 2014) Pertumbuhan ekonomi merupakan antara lain dari banyaknya faktor-faktor yang kunci keberhasilan pembangunan. Kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi daerah tujuannya untuk menumbuhkan perekonomian daerahnya melalui peningkatan pendapatan. Sularso dan Restianto (2011) menyatakan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kemandirian daerah yang ditunjukkan oleh kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB) (Sukarmini dan IGA, 2016).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2015, tumbuh 4,21 persen atau melambat dibanding 2014 sebesar 7,35 persen. Sementara itu secara umum ekonomi Provinsi Jambi pada 2015 tumbuh sebesar 4,21 persen. Perekonomian Provinsi Jambi pada 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp155,11 miliar dan PDRB per kapita mencapai Rp45,59 miliar atau 3,413 juta dolar AS. Perekonomian Jambi tumbuh sebesar 4,21 persen dimana pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang berkontraksi sebesar 0,22 persen. Sedangkan pada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 11,02 persen diikuti oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,05 persen serta informasi dan komunikasi 9,83 persen.

Struktur perekonomian Provinsi Jambi menurut lapangan usaha pada 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 28,16 persen, pertambangan dan penggalian 17,70 persen serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,48 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun lalu pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,39 persen, diikuti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,98 persen serta informasi dan komunikasi sebesar 0,32 persen.

BPS mencatat bahwa ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV-2015 mengalami pertumbuhan positif 0,36 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi, hal ini terutama disebabkan oleh kinerja positif lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tumbuh sebesar 14,80 persen. Selain itu dilihat dari sisi pengeluaran, ekonomi Jambi tahun 2015 didominasi oleh ekspor barang dan jasa sebesar 66,02 persen

dan pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai 46,00 persen. Pertumbuhan tertinggi pada sisi pengeluaran pada 2015 adalah pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang mencapai 4,41 persen. Sedangkan pembentukan modal tetap bruto justru mengalami penurunan sebesar 0,76 persen.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun (Wertianti dan Dwirandra, 2013). Menurut Uhise (2013) Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (Harianto dan Priyo, 2007).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal?
2. Bagaimanakah Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap pertumbuhan ekonomi?

2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).

Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran. Lebih dari enam puluh tahun lalu, V.O. Key sudah mengisyaratkan bahwa penganggaran memiliki satu masalah paling mendasar, yakni keterbatasan sumber daya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sector jasa, dan sektor-sektor lainnya. Jika ternyata PAD berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, maka terdapat kemungkinan kuat bahwa DAU dan DAK juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD (Setiyawati Anis, dan Ardi Hamzah, 2007).

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah, salah satu pengeluaran yang menjadi sorotan publik adalah pengeluaran dalam bentuk belanja modal. Sorotan publik tersebut cukup beralasan karena, setiap alokasi sumberdaya keuangan merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini merupakan pencerminan dari kepercayaan publik atau masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola dana publik. Dalam hal ini teori keagenan (*agency theory*) secara tegas menjelaskan hubungan antara prinsipal (*principal*) dan agen (*agency*) yang tercermin dari kontrak antara individu dengan individu lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain, menjadi salah satu rujukan utama dalam hal pertanggungjawaban dana publik. Kontrak yang dilakukan menunjukkan kesepakatan antara prinsipal selaku pemberi amanah dan agen selaku penerima amanah, hubungan ini dibangun atas dasar kepercayaan. Dalam organisasi sektor publik, khususnya pada pemerintah daerah, daerah bertindak sebagai agen selaku pihak yang menerima amanah rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan, dan rakyat yang diwakili oleh dewan perwakilan rakyat diposisikan sebagai prinsipal yang memiliki salah satu tugas utama untuk mengawasi aktivitas organisasi yang dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Tuasikal, 2008)

Salah satu wujud nyata dari hubungan keagenan dan prinsipal yang menjadi perhatian publik saat ini adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu desentralisasi, termasuk desentralisasi fiskal. Sidik (2002) menegaskan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal harus dapat: (1) meningkatkan efisiensi pengalokasian sumberdaya nasional maupun kegiatan pembangunan daerah; (2) dapat memenuhi aspirasi daerah; (3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ditingkat daerah; (4) memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah; (5) meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan

kemandirian pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya.

Dengan kemandirian daerah dalam mengelola sumberdaya daerah baik, sumberdaya keuangan maupun non keuangan menunjukkan pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam mensejahterakan rakyat. Artinya bila pemerintah daerah memiliki kepekaan yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan daerah, maka pemerintah daerah berusaha melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran dan berusaha untuk melakukan pengeluaran, terutama belanja modal yang berorientasi pada upaya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Sayangnya fungsi dan kewenangan yang diserahkan kepada daerah kurang didukung oleh kesiapan daerah dalam membiayai pembangun, karena kemampuan daerah yang satu dengan yang lain dalam hal finansial tidak sama. Untuk itu, pemerintah menindaklanjuti dengan seperangkat perundang-undangan yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan fungsi dan kewenangannya, yaitu desentralisasi fiskal.

Hal tersebut menandakan bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan yang jelas dan tegas, sehingga sumber-sumber pendapatan daerah dapat dioptimalkan sesuai untuk kebutuhan publik. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang dinyatakan di atas, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) dan pemberian hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*), dalam bentuk dana perimbangan, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai sumber penerimaan tersebut diharapkan dapat mendorong pendapatan perkapita daerah melalui peningkatan berbagai jenis pengeluaran atau belanja pemerintah yang dapat merangsang aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita (Tuasikal, Askam. 2008).

2.3. Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Diduga PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Belanja Modal.
- 2) Diduga PAD, DAU dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2011:87). Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, obyek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi obyek penelitian (Kuncoro, 2003:103). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jambi dengan jumlah 11 Kabupaten/Kota dengan periode 2011-2015.

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi (Kuncoro, 2003:103). Sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili karakteristik populasinya yang ditunjukan oleh tingkat akurasi dan presisinya (Sanusi, 2011: 88). Sampel penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di provinsi Jambi dengan jumlah 11 Kabupaten/Kota dengan periode 2011-2015. Metode pengambilan sampel adalah *porposif sampling*.

Dalam penelitian ini, populasi adalah semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Karena semua populasi merupakan objek penelitian, maka populasi tersebut juga merupakan sampel dalam penelitian ini. Adapun populasi/sampel adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota yang melaporkan APBD pada kementerian keuangan dan dipublikasikan pada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah selama periode 2011-2015.
2. Kabupaten/Kota dengan data realisasi APBD dimana terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Alokasi Umum (DAU), PDRB dan Belanja modal.

3.2. Variabel Penelitian

3.2.1. Variabel Dependen

Variabel terikat atau variabel tergantung (*Dependent Variable*) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Sanusi, 2011:50). Variabel dependen dalam penelitian ini ada dua. Pertama, Belanja modal diperlakukan sebagai variabel independen. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur peningkatan pendidikan; pelayanan kesehatan; membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal; menyediakan perumahan dengan biaya rendah; melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian (Saad, 2009).

3.2.2. Variabel Independen

Variabel independen (*Independent Variabel*) disebut juga dengan variabel bebas. Variabel bebas

adalah variabel yang memengaruhi variabel lain (Sanusi, 2011:50).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah**
 Dalam UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
2. **Dana Alokasi Umum**
 PP No.55/2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota yang besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN
3. **Belanja Modal**
 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi mempunyai nilai minimum sebesar 18.06 yaitu pada tahun 2011 dan nilai maksimum sebesar 99.34 pada tahun 2015. Nilai rata-rata PAD adalah sebesar 58.5862 dengan nilai standar deviasi sebesar 24.61660. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa kontribusi PAD Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi tidak jauh berbeda dari tahun ke tahunnya.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi mempunyai nilai minimum sebesar 257.77 yaitu pada tahun 2011 dan nilai maksimum sebesar 678.82 pada tahun 2015. Nilai rata-rata DAU adalah sebesar 464.2731 dengan nilai standar deviasi sebesar 103.64346. Nilai standar deviasi yang

lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa kontribusi DAU Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi tidak jauh berbeda dari tahun ke tahunnya.

Variabel Belanja Modal (BM) Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi mempunyai nilai minimum sebesar 111.81 yaitu pada tahun 2011 dan nilai maksimum sebesar 397.73 pada tahun 2015. Nilai rata-rata BM adalah sebesar 239.7376 dengan nilai standar deviasi sebesar 77.68203. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa kontribusi BM Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi tidak jauh berbeda dari tahun ke tahunnya.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi mempunyai nilai minimum sebesar 1.81 yaitu pada tahun 2011 dan nilai maksimum sebesar 9.74 pada tahun 2015. Nilai rata-rata PE adalah sebesar 6.8744 dengan nilai standar deviasi sebesar 1.74575. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa kontribusi PE Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi tidak jauh berbeda dari tahun ke tahunnya.

4.1 Analisis Regresi

4.1.1 Simulasi Regresi 1

Tabel 1
Nilai Koefisien, Nilai-t dan Signifikansi Regresi 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-4.754	26.448		-.180	.858
PAD	1.487	.385	.471	3.861	.000
DAU	.339	.091	.452	3.708	.001

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai koefisien PAD sebesar 1.487 dengan nilai t sebesar 3.861 dan signifikansi 0.000. Sedangkan nilai koefisien DAU sebesar 0.339, dengan nilai t sebesar 3.708 dan signifikansi 0.001. Karena nilai t-statistik yang diperoleh > 1.96 dan nilai signifikansi < 0.05 maka membuktikan bahwa variabel Pendaatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM).

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai r-square pada variabel BM sebesar 0.790. Artinya bahwa variasi ada variabel Belanja Modal (BM) mampu dijelaskan oleh variabel PAD dan DAU sebesar 79% sedangkan sisanya 21% dijelaskan oleh variabel lain.

4.1.2 Simulasi Regresi 2

Untuk menjawab tujuan kedua, dilakukan analisis regresi dengan menempatkan variabel-variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM), sedangkan Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebagai variabel dependen. Selain itu, dilakukan pula regresi dengan menempatkan belanja modal sebagai variabel bebas dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat. Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel

Tabel 2
Nilai Koefisien, Nilai-t dan Signifikansi Regesi 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.374	.612		2.244	.029
PAD	.019	.010	.270	1.896	.064
DAU	.006	.002	.338	2.393	.020
BM	.007	.003	.322	2.258	.028

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai koefisien PAD sebesar 0.019 dengan nilai t sebesar 1.896 dan signifikansi 0.064. Sedangkan nilai koefisien DAU sebesar 0.006, dengan nilai t sebesar 2.393 dan signifikansi 0.020. Nilai koefisien BM sebesar 0.007 dengan nilai t-statistik sebesar 2.258 dan signifikansi 0.028. Karena nilai t-statistik yang diperoleh DAU dan BM > 1.96 dan nilai signifikansi < 0.05 maka membuktikan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Sedangkan PAD nilai signifikansi hanya $0.064 > 0.05$ tapi < 0.10 maka diterima pada taraf signifikansi 10%.

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R-square pada variabel PE sebesar 0.782. Artinya bahwa variasi ada variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) mampu dijelaskan oleh variabel PAD DAU dan BM sebesar 78.2% sedangkan sisanya 21.9% dijelaskan oleh variabel lain.

4.2 Pengujian Hipotesis

Dari hasil analisis regresi kemudian dapat dilakukan pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut.

1) Hipotesis 1

Nilai koefisien PAD ke BM sebesar 1.487 dengan standar error 0.385, nilai t-statistik 3.861 dan signifikansi 0.000. Karena nilai t-statistik $3.861 > 1.96$ dan p-value signifikansi $0.000 < 0.05$ maka terima Hipotesis 1, terbukti bahwa Pendapatan

Asli Daerah (PAD) signifikan berpengaruh langsung terhadap Belanja Modal (BM).

2) Hipotesis 2

Nilai koefisien DAU ke BM sebesar 0.339 dengan standar error 0.091, nilai t-statistik 3.708 dan signifikansi 0.001. Karena nilai t-statistik $3.708 > 1.96$ dan p-value signifikansi $0.001 < 0.05$ maka terima Hipotesis 2, terbukti bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) signifikan berpengaruh langsung terhadap Belanja Modal (BM).

3) Hipotesis 3

Nilai koefisien PAD ke PE sebesar 0.019 dengan standar error 0.010, nilai t-statistik 1.896 dan signifikansi 0.064. Karena nilai t-statistik $1.896 < 1.96$ dan p-value signifikansi $0.064 > 0.05$ maka terima hipotesis nol, artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).

4) Hipotesis 4

Nilai koefisien DAU ke PE sebesar 0.006 dengan standar error 0.002, nilai t-statistik 2.393 dan signifikansi 0.020. Karena nilai t-statistik $2.393 > 1.96$ dan p-value signifikansi $0.020 < 0.05$ maka terima Hipotesis 4, terbukti bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) signifikan berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).

5) Hipotesis 5

Nilai koefisien BM ke PE sebesar 0.007 dengan standar error 0.003, nilai t-statistik 2.258 dan signifikansi 0.028. Karena nilai t-statistik $2.258 > 1.96$ dan p-value signifikansi $0.028 < 0.05$ maka terima Hipotesis5, terbukti bahwa Belanja Modal (BM) signifikan berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).

6) Hipotesis 6

Untuk menguji hipotesis 6 dapat dilihat pada hasil uji F dari regresi pertama yang selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

Nilai Uji F dan Signifikan Regresi 1

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	257572.130	2	128786.065	98.064	.000 ^b
Residual	68290.739	52	1313.283		
Total	325862.869	54			

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 98.064 dengan signifikansi 0.000. Karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0.000 < 0.05$ maka terbukti bahwa variabel pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM).

7) Hipotesis 7

Untuk menguji hipotesis 7 menggunakan nilai uji F dari regresi kedua yang selengkapnya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Nilai Uji F dan Signifikan Regresi 2

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	128.734	3	42.911	61.065	.000 ^b
Residual	35.839	51	.703		
Total	164.573	54			

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 61.065 dengan signifikansi 0.000. Karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0.000 < 0.05$ maka terbukti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).

Dalam model regresi yang dikembangkan terdapat variabel Belanja Modal (BM) sebagai variabel intervening/mediasi hubungan pengaruh baik antara PAD ke PE maupun dari DAU ke PE. Dari hubungan tersebut terdapat pengaruh tidak langsung dari PAD dan DAU ke PE melalui BM. Untuk menguji pengaruh tidak langsung tersebut atau menguji variabel BM sebagai mediasi/intervening maka digunakan uji *sobel test*.

8) Hipotesis 8

Koefisien pengaruh tidak langsung dari PAD ke PE melalui BM sebesar $1.487 \times 0.007 = 0.0104$.

Perhitungannya nilai z sobel tes sebagai berikut:

$$z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SE_a^2) + (a^2 SE_b^2)}}$$

$$z = \frac{0.0104}{\sqrt{0.000027}}$$

$$z = 1.99$$

Dimana :

- a = koefisien pengaruh PAD ke BM
- b = koefisien pengaruh BM ke PE
- SE_a = standard error pengaruh PAD ke BM
- SE_b = standard error pengaruh BM ke PE

Oleh karena z sebesar 1.99 lebih besar dari Z 1.98 pada tingkat signifikansi 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0.0104 adalah signifikan. Hal ini membuktikan bahwa Belanja Modal (BM) signifikan sebagai variabel intervening pengaruh pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).

9) Hipotesis 9

Koefisien pengaruh tidak langsung dari DAU ke PE melalui BM sebesar $0.339 \times 0.007 = 0.0023$. Perhitungan nilai z sebagai berikut :

$$z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SE_a^2) + (a^2 SE_b^2)}}$$

$$z = \frac{0.0023}{\sqrt{0.000001}}$$

$$z = 1.98$$

Dimana :

- a = koefisien pengaruh DAU ke BM
- b = koefisien pengaruh BM ke PE
- SE_a = standard error pengaruh DAU ke BM
- SE_b = standard error pengaruh BM ke PE

Oleh karena z sebesar 1.98 \geq Z 1.98 pada tingkat signifikansi 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0.0023 adalah signifikan. Hal ini membuktikan bahwa Belanja Modal (BM) signifikan sebagai variabel intervening pengaruh pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian secara empiris, telah diperoleh temuan penelitian dan kontribusi teoritisnya.

4.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dicerminkan melalui pendapatan asli daerah. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat yang berarti ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dan begitu juga sebaliknya. Adanya peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik dengan baik melalui sarana dan prasarana yang dapat diwujudkan dalam belanja modal, seperti belanja jalan, bangunan, tanah, mesin, dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/ kota se Provinsi Jambi, yang berarti H₁

diterima. Hasil mengindikasikan bahwa dalam manajemen pengeluaran pemerintah daerah di kabupaten/ kota se Provinsi Jambi yang tercermin dalam APBD, pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang turut menentukan besar kecilnya alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/ kota se Provinsi Jambi. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap pembiayaan belanja modal karena dananya relatif besar, sehingga memenuhi belanja modal.

Hasil juga membuktikan bahwa pemerintah daerah telah bertanggung jawab dengan mengalokasikan pajak, retribusi dan lain-lain yang merupakan sumbangsih dari masyarakat kepada belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana, seperti jalan, bangunan, tanah dan lain-lain yang memadai yang dianggarkan setiap tahunnya untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini akan meningkatkan alokasi belanja modal.

Hal ini juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian Maimuna dan Rusdi (2008); Santosa dan Rofiq (2013); Mawarni, dkk (2013); Martini, dkk (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

4.3.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana alokasi umum merupakan dana transfer yang bersifat *block grant*. Alokasi penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah yang idealnya dialokasikan untuk belanja yang berimplikasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari dana alokasi umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di

kabupaten/ kota se Provinsi Jambi, yang berarti H₂ diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan dari dana alokasi umum. Semakin tinggi dana alokasi umum maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki dana alokasi umum yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah, termasuk belanja modal akan meningkat. Pengalokasian dana alokasi umum yang cukup besar nilainya yang merupakan dana transfer dari pusat dimanfaatkan untuk dialokasikan atau membiayai belanja modal daerah yang akan digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana, seperti jalan, bangunan, mesin, tanah dan lain-lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hariyanto dan Adi (2007) serta Adyatama dan Oktaviani (2015) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

4.3.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah. Perspektif ini menyarankan bahwa pemerintah daerah harus lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal guna menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika pendapatan asli daerah akan meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Hariyanto dan Adi, 2007).

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan pendapatan asli daerah sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRBnya dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/ kota se Provinsi Jambi, yang berarti H₃ ditolak. Peningkatan pendapatan asli daerah harus berdampak pada perekonomian daerah. Namun, hasil penelitian mengindikasikan bahwa adanya eksploitasi pendapatan asli daerah terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan

produktifitas masyarakat itu sendiri. Pendapatan asli daerah yang merupakan cerminan retribusi, pajak dan lain-lain di kabupaten/ kota Jambi seharusnya berperan untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun, di kabupaten/ kota se Provinsi Jambi belum mampu mengelola pendapatan asli daerah dengan baik untuk dialokasikan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan dan mengoptimalkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa serta sektor-sektor lainnya.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Hariyanto dan Adi (2007) Mawarni, dkk (2013), dimana pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4.3.4. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana alokasi umum dapat menunjang pertumbuhan ekonomi apabila dana tersebut dialokasikan ke kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, seperti sektor jasa, sektor pertanian, dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/ kota se Provinsi Jambi, yang berarti H_4 diterima. Hal ini berarti semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena peran dana alokasi umum sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah dana alokasi umum. Setiap dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal. Hal ini tidak jauh beda dari peran pendapatan asli daerah yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mawarni, dkk (2013) serta Gunantara dan Dwirandra (2014) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.3.5. Pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1995) bahwa ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumber daya manusia, (2) sumber daya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Dalam hal ini pengeluaran modal pemerintah berperan menjadi *social overhead capital* (SOC) yang menjadi daya tarik pihak swasta untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya berbagai fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan.

Pertambahan belanja modal yang juga berarti bertambahnya *social overhead capital* (SOC) termasuk didalamnya semakin meningkat dan baiknya infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Saragih (2003) menjelaskan bahwa jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja modal atau pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/ kota se Provinsi Jambi, yang berarti H_5 diterima. Hasil mengindikasikan bahwa belanja modal yang dianggarkan oleh pemerintah telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal lainnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian belanja modal telah mampu meningkatkan pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, jasa, dan lain-lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Purbadharmaja (2006) dan Sodik (2007) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi nyata dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.3.6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (BM)

Pendapatan asli daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat yang berarti ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Karena dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik dengan baik.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari dana alokasi umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal di kabupaten/ kota se Provinsi Jambi, yang berarti H_6 diterima. Hasil mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum telah berkontribusi dalam anggaran belanja modal kabupaten/ kota di Provinsi Jambi. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki kontribusi yang besar dalam belanja pemerintah karena pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum di kabupaten/ kota se Provinsi Jambi cukup besar. Pengalokasian pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pada belanja modal digunakan pemerintah untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat yang dianggarkan dalam belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mawarni, dkk (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

4.3.7. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Hariyanto dan Adi, 2007). Selain itu, dana alokasi umum yang merupakan dana transfer oleh pusat juga digunakan untuk pembiayaan belanja daerah. Dana alokasi umum juga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi apabila dana tersebut dialokasikan ke kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, seperti sektor jasa, sektor pertanian, dan lain-lain.

Belanja Modal memiliki peran yang sangat penting guna meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat mendukung peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan padagilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/ kota se Provinsi Jambi, yang berarti H_7 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor-sektor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah, seperti sektor jasa, sektor pertanian, dan lain-lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Gunantara dan Dwirandra (2014); Mawarni, dkk (2013) serta Nopiani, dkk (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.3.8. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan Belanja Modal (BM) sebagai Variabel Intervening

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal terbukti menjadi variabel intervening dari pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai intervening di kabupaten/ kota se Provinsi Jambi, yang berarti H_8 diterima.

Hasil mengindikasikan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten/ kota se Provinsi Jambi, artinya pendapatan asli daerah mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena adanya alokasi pendapatan asli daerah ke pelaksanaan belanja modal yang akan membelanjakan kepada belanja seperti membangun jalan, tanah, bangunan, mesin dan lain-lain yang bersifat investasi yang dapat berguna bagi rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila suatu daerah infrastrukturnya baik maka akan mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi seperti sektor jasa, pertanian, dan lain-lain. Infrastruktur daerah yang baik akan membantu jalannya sektor perekonomian rakyat dengan baik pula sehingga hal ini dapat berpengaruh dalam meningkatkan PDRB sehingga perekonomian daerah mengalami pertumbuhan yang cukup baik.

4.3.9. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan Belanja Modal (BM) sebagai Variabel Intervening

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal terbukti menjadi variabel intervening dari pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai intervening di

kabupaten/ kota se Provinsi Jambi, yang berarti H_0 diterima.

Hasil mengindikasikan bahwa pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten/ kota se Provinsi Jambi, artinya dana alokasi umum mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena adanya alokasi dari dana alokasi umum terhadap pelaksanaan belanja modal yang akan membelanjakan kepada belanja seperti membangun jalan, tanah, bangunan, mesin dan lain-lain yang bersifat investasi yang dapat berguna bagi rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ini dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja bersifat investasi khususnya infrastruktur daerah. Apabila suatu daerah infrastrukturnya baik maka akan mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi seperti sektor jasa, pertanian, dan lain-lain. Infrastruktur daerah yang baik akan membantu jalannya sektor perekonomian rakyat dengan baik pula sehingga hal ini dapat berpengaruh dalam meningkatkan PDRB sehingga perekonomian daerah mengalami pertumbuhan yang cukup baik.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dengan nilai yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian peneliti ini berhasil membuktikan bahwa PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM).
2. Pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/ kota Provinsi Jambi dengan nilai signifikansi dari DAU $0,020 < 0,05$. Sementara itu nilai perolehan dari BM sebesar $0,028 < 0,05$, sedangkan PAD mempunyai nilai signifikansi hanya $0,064 > 0,05$ tapi $< 0,10$ maka diterima pada taraf signifikansi 10%. Untuk uji simultan, nilai dari regresi 2 sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa PAD, DAU, dan BM berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/ kota se Provinsi Jambi hendaknya meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang ada dengan cara menginventarisir potensi dan peluang untuk meningkatkan potensi daerah seperti pajak yang selama ini belum

terperhatikan agar dapat menunjang anggaran belanja pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Pemerintah kabupaten/ kota se Provinsi Jambi hendaknya memanfaatkan pendapatan asli daerah dengan baik dengan menefisiensi penggunaan sumber pendapatan daerah yang sudah ada dan mengalokasikan dana dengan melihat segi manfaatnya bagi kepentingan masyarakat agar dapat menunjang sektor-sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, jasa, dan lain-lain sehingga pertumbuhan ekonomi daerah yang dicerminkan melalui PDRB dapat meningkat.
3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya mengkaji mengenai PAD, DAU, terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk kedepannya peneliti bisa menambah variabel lain yang belum sempat dikaji pada penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adyatama, Erdi dan Rachmawati Meita Oktaviani. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi*. Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, November 2015, Vol 4 No. 2, ISSN: 1979-4878, Hlm: 190-205.
- Gunantara, Putu Candra & Dwirandra, A. A. N. B. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.3 (2014): 529-546, ISSN: 2302-8556
- Harianto, David dan Prio Hari Adi. 2007 *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita*. Simposium Nasional Akuntansi X. 26-28 Juli. Makassar
- Maimuna, M dan Rusdi Akbar. 2008. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera*. Jurnal Reset Akuntansi Indonesia. Vol.1 Januari 2008
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.
- Martini, Ni Luh Dina Selvia., dkk. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta*. Jurnal. Universitas Pendidikan Ganesha.

- Mawarni, Darwanis Sari dan Syukriy Abdullah. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh)*. Jurnal Akuntansi, ISSN 2302-0164, PP. 80-90. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh.
- Purbadharmaja. 2006. *Implikasi Variabel Pengeluaran dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Bali*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol .11 No.1: 79-91. ISSN1410-4638.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D. 1995. *Makro Ekonomi*. IKAPI: Jakarta.
- Santosa, A.B. dan M.A. Rofiq. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota (studi kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007-2010)*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol. 2 (2).
- Sodik Jamzani. 2007. *Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.12 No.1: 27-36.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126). Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Setyawati, anis dan Ardihamzah. 2007. *Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, kemiskinan, dan Pengangguran (Pendekatan Analisis Jalur)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 4
- Tuasikal, Askam. 2008. *Pengaruh DAU, DAK, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 1
- Uhise, Stepvani. 2013. *Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4
- Santosa, A.B, dan M.A Rofiq. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kab/Kota (Studi Kasus Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Periode Tahun 2007-2010)* Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 2
- Sularso, Haviddan Yanuar E. Restianto. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*, Media Riset Akuntansi. Vol 1
- Sidik Machfud, 2002 *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*.
- Wertianti, I G AGede, dan Dwirandra. (2013) *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD Dan DAU sebagai Variabel Moderasi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN
- Sanusi, Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonom*. Jakarta: Erlangga